

BAB III

AGRESI MILITER ISRAEL KE GAZA 2009

Pasca berakhirnya gencatan senjata antara Israel-Palestina tanggal 19 Desember 2008, konflik antara kedua negara ini makin memanas. Gencatan senjata yang telah disepakati enam bulan sebelumnya yang dimediasi oleh Mesir ini, sepertinya tidak akan mengalami perpanjangan waktu. Israel masih saja melakukan blokade di jalur Gaza dan melakukan berbagai macam provokasi. Hamas yang menguasai Gaza sejak Juni 2007 tentu melakukan perlawanan terhadap Israel. Sikap Hamas yang melakukan perlawanan inilah yang dijadikan alasan Israel untuk menyerang Gaza. Israel terus saja menebarkan ancaman akan menyerang Gaza jika Hamas tidak segera menghentikan serangan roketnya ke wilayah Israel. Berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Israel Ehud Olmert semakin mempertegas keinginan Israel untuk melakukan serangan militer ke Gaza.

A. Sejarah Konflik Israel-Palestina

Sejak zaman dulu, wilayah di sebelah barat sungai Jordan sudah dikenal sebagai tanah Palestina. Mulai awal abad ke 16 sampai dengan akhir Perang Dunia I, Palestina berada dibawah kekuasaan Turki / kekaisaran Otoman. Kekalahan Turki dalam PD I menyebabkan pindahnya kekuasaan atas Palestina kebawah kekuasaan Inggris, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa.

Gambar V

Peta Jalur Gaza



Pada tahun 1947 mandat yang diberikan kepada Inggris dipindahkan ke bawah PBB, seiring bertambahnya orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok dunia yang datang ke wilayah Yahudi di Palestina serta semakin maraknya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang-orang Arab di wilayah itu dimana Inggris merasa tidak sanggup lagi mengatasinya.

Pada Mei 1948 Israel memproklamkan kemerdekaannya dan secara paksa mendirikan sebuah negara di Palestina dan dengan secara paksa pula Israel telah mengusir 750.000 rakyat Palestina dari rumahnya (negeranya sendiri) dan ratusan rumah dibumihanguskan. Tanah Palestina saat itu telah diklaim sebagai milik Israel. Hingga pada tanggal 11 Desember 1948, melalui resolusi Nomor 194 dari Majelis Umum PBB menetapkan pembentukan dua negara di Palestina, yaitu Palestina dan Israel. Secara hukum, sebenarnya telah disepakati bahwa Israel wajib menerima kembali rakyat Palestina yang terusir dan mengganti kerugian atas serangan-serangan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina.

Gambar VI

Peta Paletina dan Israel Raya



Tapi isi perjanjian perundingan perdamaian saat itu seperti hanya tinggal wacana belaka. Karena kenyataannya, Palestina tidak juga mendapatkan haknya. Nasib pengungsi Palestina pun semakin terkatung-katung. Karena Israel masih menolak hak pengembalian pengungsi Palestina ke tanah airnya sendiri. Israel tidak pernah tulus menunjukkan niat untuk benar-benar ingin berdamai dengan Palestina.

Israel kemudian berhasil memperluas wilayahnya termasuk penguasaannya terhadap lebih dari setengah kota Yerusalem (Barat), setelah memenangkan konflik bersenjata dengan orang-orang Arab sepanjang tahun 1948-1949. Dengan meluasnya wilayah yang dikuasai Israel tersebut, maka Jalur Gaza yang berada di bawah kekuasaan Mesir terpisah dengan sungai Jordan. Wilayah ini kemudian disatukan oleh Yordania ke dalam negaranya tahun 1950.¹

¹ Musma Musa Abbas, *Memorandum Akhir Jabatan Sebagai Duta Besar RI Untuk Negara Palestina, Buku II*, 2004, hal. 10

Pada tahun 1967, Israel melancarkan Perang Enam Hari atas Arab untuk memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Tepi Barat, Jalur Gaza, Jerussalem dan Dataran Tinggi Golan Syiria. Hingga pada tahun 1970-an, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memainkan peran utama dalam perjuangan pembebasan terhadap rakyat Palestina. Dengan dibentuknya PLO, telah merubah taktik Israel dengan menghentikan kebijakan penyerangan untuk sementara waktu.

Israel secara kontroversial telah merancang pemisahan diri dan menyatakan akan menyingkirkan seluruh warga sipil dan militer Palestina di Jalur Gaza. Israel berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa Jalur Gaza adalah wilayah pendudukan dan Israel menghendaki dibangunnya tembok penghalang di Tepi Barat Israel guna mempertahankan situasi di Tepi Barat. Dan secara tegas mengizinkan Palestina untuk membangun sebuah tanah air, tetapi dengan campur tangan Israel.

Hingga pada tahun 1993, ditanda tangani kesepakatan Oslo yang mengarah kepada terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Tapi lagi-lagi kesepakatan perdamaian tersebut hanya tinggal sebuah wacana belaka. Hingga kini, konflik antara Palestina dengan Israel terus saja terjadi. Dan lagi-lagi Israel tidak juga mau untuk menarik diri dari daerah pendudukannya atas wilayah Palestina seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Bahkan Israel terus melakukan penindasan dan penyerangan terhadap Palestina.

B. Alasan Israel Menyerang Gaza

Konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina yang terus terjadi membawa konflik ini lebih menyempit menjadi konflik antara Israel dengan Hamas yang telah menguasai Jalur Gaza sejak Juni 2007. Dibanding dengan faksi Fatah yang menguasai wilayah Tepi Barat, Hamas memang lebih keras dan terus melakukan perlawanan terhadap Israel. Sedangkan Fatah lebih dikenal moderat dan cenderung bersifat lunak terhadap Israel. Akibat dari perlawanannya maka Hamas mendapat sebutan sebagai organisasi teroris oleh Israel.

Sejak terjadinya gencatan senjata yang disepakati Israel dan Hamas, kondisi di Jalur Gaza tidak kunjung membaik. Israel justru melakukan blokade di seluruh perbatasan wilayah Gaza. Israel juga memutus aliran listrik, menghentikan pasokan gas, serta memutus aliran air bersih ke Gaza. Bahkan Israel juga menghentikan bantuan makanan serta obat-obatan ke Gaza dengan dalih untuk menghindari penyelundupan senjata yang dikhawatirkan akan menambah kekuatan Hamas. Warga Gaza pun terpaksa membuat terowongan-terowongan bawah tanah untuk memasukkan pasokan makanan dan obat-obatan dari luar wilayah Gaza.

Sebagai bentuk protes terhadap blokade Israel yang terus berlangsung, maka setelah masa gencatan senjata berakhir, Hamas melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Serangan roket yang dilancarkan oleh Hamas ini juga bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa masih ada perlawanan rakyat Palestina dan keinginan yang kuat dari rakyat Palestina untuk merdeka.

Serangan roket dari Hamas inilah yang dijadikan Israel sebagai alasan untuk melancarkan serangan militer ke Gaza. Israel mengatakan tujuan utama dari serangan militernya ke Gaza adalah untuk menumpas gerakan Hamas yang mereka sebut sebagai gerakan terorisme. Israel menganggap Hamas melanggar kesepakatan dengan tidak menghentikan serangan roket dan mortir. Sebaliknya, Hamas menuding Israel tidak mematuhi kesepakatan karena masih memblokir Gaza dan menutup penyeberangan.

Menurut harian Los Angeles Times, intelijen Israel telah menyusun "daftar target" serangan selama dua tahun. Dalam daftar itu tercantum lokasi-lokasi yang dianggap penting dan strategis oleh kelompok Hamas. Tempat strategis itu antara lain terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai sarana penyelundupan, gedung parlemen, masjid, rumah persembunyian Hamas, gudang penyimpanan senjata, kamp pelatihan, kantor polisi, dan markas intelijen Hamas.

C. Rencana Agresi Militer Israel ke Gaza

Gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza selama enam bulan hasil mediasi Mesir, tidak membawa kemajuan bagi proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Israel masih terus memblokade Gaza dan melakukan provokasi berupa serangan-serangan ke Jalur Gaza. Sikap Israel yang tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata memicu reaksi balasan dari para pejuang Palestina di Gaza terutama Hamas yang menguasai wilayah Gaza sejak Juni 2007. Israel memanfaatkan aksi-aksi balasan Hamas untuk mencari-cari alasan agar bisa menyerang Gaza. Menjelang berakhirnya kesepakatan gencatan

senjata tanggal 19 Desember 2008, para pejabat pemerintahan Israel berulang kali mengancam akan melakukan serangan besar ke Jalur Gaza untuk menumbangkan Hamas.

Rezim Zionis Israel menyatakan akan melakukan apa saja untuk menumbangkan kekuasaan Hamas di Jalur Gaza. Mereka juga mengatakan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan besar-besaran ke Gaza. Menlu Israel Tzipi Livni yang akan maju menjadi kandidat perdana menteri dalam pemilu Israel bulan Februari 2009 menegaskan, Israel mengizinkan tindakan apapun untuk memberangus Hamas, termasuk jika ia terpilih menjadi perdana menteri dalam pemilu nanti. Livni juga menyatakan bahwa tindakan yang akan dilakukan harus berupa tindakan militer, ekonomi dan diplomatik. Sementara itu, jajaran kabinet Israel menyatakan bahwa menumbangkan Hamas yang sejak Juni 2007 menguasai Jalur Gaza adalah sebuah keharusan.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert meminta warga Gaza untuk menghentikan tembakan roket Hamas ke wilayah Israel. Dalam wawancara dengan televisi al-Arabiya, Olmert menyatakan pihaknya tidak ingin berperang dengan melawan rakyat Palestina tapi hanya ingin melawan Hamas. Akan tetapi pernyataan Olmert ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam agresi militer Israel ke Gaza yang merupakan agresi terbesar Israel selama 60 tahun konflik Israel-Palestina ini, justru yang kebanyakan menjadi korban adalah masyarakat sipil, bahkan diantara mereka adalah anak-anak dan wanita.

Keberanian Israel melakukan agresi militernya ke Gaza ini dikarenakan telah mendapatkan dukungan dari negara sekutu-sekutunya terutama AS dan sejumlah negara Eropa. Sebelum melakukan agresi, Israel menyatakan akan mencari dukungan internasional untuk mendukung serangannya ke Jalur Gaza. Hal ini terbukti dengan pernyataan pemerintah AS yang menyalahkan Hamas atas serangan yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza dan menyerukan agar Israel menghindari korban dari kalangan warga sipil. Dengan kata lain, AS dengan cara halus menunjukkan dukungannya atas agresi Israel ke Jalur Gaza. Juru Bicara Gedung Putih Gordon Johndroe juga menyalahkan Hamas dan menyebutnya sebagai teroris. Dukungan AS yang lain juga diwujudkan dalam sikap AS yang tidak mendukung resolusi yang dikeluarkan PBB atas agresi militer Israel ini dan memilih untuk abstain.

Sebelum serangan Israel ke Gaza dimulai, kedua negara memang telah sama-sama mencari dukungan dari luar negeri. Hari Senin tanggal 22 Desember 2008, Perdana Menteri Ehud Olmert berada di Ankara menemui Presiden Turki, Abdullah Gül dan Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan yang bertindak sebagai mediator dalam perundingan tidak langsung. Sedangkan Presiden Palestina, Mahmud Abbas mengakhiri perjalanannya dari Washington di Kremlin hari Senin, untuk menggalang bantuan dari Rusia. Sementara Israel pada hari Senin itu juga mulai melakukan kampanye untuk menggalang dukungan internasional, apabila akhirnya melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Palestina. Sebelum berangkat ke Ankara, Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert yang masih memimpin kabinet transisi Jerusalem, mengutarakan pesan yang

ditujukan kepada kelompok Hamas: “Pemerintah yang bertanggung jawab tidak gemar berperang, tapi juga tidak menghindar bila terpaksa. Kami akan mengambil langkah yang sesuai.”

Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 2008, agresi militer Israel atas Gaza pun mulai dilancarkan. Korban sipil yang kebanyakan adalah anak-anak dan wanita pun menjadi korban. Berbagai reaksi menentang agresi militer Israel ini telah ditunjukkan masyarakat di beberapa negara, serta berbagai organisasi Internasional. Bahkan beberapa negara menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Badan Persatuan Bangsa-Bangsa pun juga telah mengeluarkan resolusinya melalui Dewan Keamanan serta Dewan Hak Asasi Manusia, untuk menghentikan konflik yang memakan begitu banyak korban ini.

Agresi militer Israel ke Gaza ini menjadi masukan bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam mengambil keputusan untuk menentang atau mendukung agresi militer Israel ke Gaza, karena berdasarkan fakta bahwa agresi militer Israel ke Gaza dengan alasan ingin menyerang kelompok perlawanan Hamas tidak terbukti, pada kenyataannya agresi militer ini justru mengakibatkan korban dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Keputusan masyarakat Muslim Indonesia ini tentu dengan berdasarkan nilai yang tertanam dalam setiap masyarakat Indonesia yaitu UUD 1945.

D. Tujuan Serangan Militer Israel Ke Gaza

Meskipun Israel telah menyatakan bahwa tujuan utama dari serangan militer mereka ke Gaza adalah untuk menumpas gerakan teroris Hamas, namun

masih perlu diragukan. Israel pantas dicurigai mempunyai tujuan lain dalam serangan militernya kali ini, seperti menguasai wilayah Gaza guna terus memperluas kekuasaannya. Hal ini bisa dilihat dengan fakta bahwa pada awal masa kemerdekaannya, Israel hanya menguasai 5% dari wilayah Palestina. Akan tetapi kini Israel telah menguasai lebih dari 80% wilayah Palestina.

Selain itu, Israel juga disinyalir mempunyai tujuan strategis politik dan menciptakan perubahan politik jangka panjang dalam hubungannya dengan Palestina demi kepentingan Israel dalam hal keamanan dan eksistensinya serta memarginalkan atau melenyapkan eksistensi Palestina. Ada tujuan politik secara langsung dan tidak langsung dalam serangan militer Israel kali ini. Dalam tujuan secara langsung Israel ingin mencapai tujuan tertentu, yaitu :

1. Mengisolasi pemerintah Palestina yang dipimpin Hamas dan melumpuhkannya dalam rangka menggagalkan atau menjatuhkan pemerintahan ini. Ini mengingatkan tindakan Israel mengisolasi mendiang presiden Palestina, Yaser Arafat tahun 2002.
2. Menghancurkan infrastruktur organisasi perlawanan Hamas dan menciptakan wilayah keamanan yang luas yang tidak tersentuh oleh serangan roket perlawanan di masa depan. Pada skenario semacam ini Israel seakan ingin kembali melakukan penjajahan dan kembali ke Jalur Gaza yang sudah ditinggalkan dengan alasan membebani secara demografi, politik, keamanan dan moral.

3. Mencegah Palestina untuk bersatu dan saling bahu-membahu. Apalagi setelah menemukan titik kesepakatan dengan menyepakati piagam kesepakatan nasional.
4. Merehabilitasi wibawa tentara Israel dan mengembalikan pengaruhnya dalam menggertak Palestina. Sebab beberapa kali operasi serangan militer Hamas dinilai telah menciptakan keberhasilan besar dalam perhitungan militer.

Tidak hanya tujuan politik langsung yang ingin dicapai Israel dalam serangan militernya kali ini, tetapi ada tujuan politik jangka panjang yang ingin mereka capai. Adapun tujuan-tujuan politik strategis jangka panjang Israel dalam serangan militernya kali ini adalah sebagai berikut:

1. Mematahkan semangat Palestina dengan menciptakan teror dan mempersulit kehidupan mereka. Israel ingin menegaskan kepada Palestina bahwa mereka harus membayar mahal akibat perlawanan mereka. Inilah tujuan inti penghancuran Israel terhadap pembangkit listrik Palestina, penampungan air bersih, jembatan, jalan-jalan, memutus jalan-jalan penghubung dan menutup perlintasan-perlintasan.
2. Membiarkan konflik dengan Palestina dalam lingkup keamanan dan menjadikannya sebagai pembenaran dari proses perdamaian bahwa tidak ada partner Palestina di dalamnya dan Palestina tidak siap mengatur situasi yang mereka hadapi serta problem yang mereka hadapi bukan berasal dari penjajahan Israel.

3. Menciptakan kondisi yang sesuai bagi Israel dan Palestina, Negara kawasan Timur Tengah dan internasional untuk menerapkan “rencana penarikan” dari Tepi Barat sehingga Israel bisa menetapkan perbatasan dengan persetujuan Palestina baik suka rela atau terpaksa.

Selain tujuan politik secara langsung dan tujuan politik jangka panjang diatas, Israel juga mempunyai beberapa tujuan lain yang menyangkut situasi politik di dalam negeri Israel sendiri. Serangan militer Israel kali ini dicurigai bermuatan politis karena pelaksanaannya berdekatan dengan pemilihan parlemen Israel pada 10 Februari 2009. Harian The Chicago Tribune menyebutkan, popularitas PM Olmert, Menteri Pertahanan Ehud Barak, dan Menlu Tzipi Livni melesit karena serangan ke Gaza. Ketiganya didesak rakyat Israel segera membalas serangan roket Hamas. Karena musim kampanye pemilihan sudah dekat, ketiganya memutuskan mulai menyerang Gaza setelah mendapat restu dari kabinet Israel.²

Pakar politik di Hebrew University of Jerusalem, Reuven Hazan, menyatakan, Olmert jelas memiliki tujuan lain untuk kepentingannya sendiri, yakni memulihkan citranya yang tercoreng akibat skandal korupsi dan kegagalan perang di Lebanon. Ia juga menyatakan bahwa Olmert tak mau mengakhiri kekuasaannya dengan predikat orang gagal. Menurutnya Olmert hanya ingin menyelamatkan citranya.³

Sementara itu, Ehud Barak (Ketua Partai Buruh) dan Tzipi Livni (Ketua Partai Kadima) yang akan berhadapan dengan Ketua Partai Likud Benjamin

² Kompas, 4 Januari 2009, *Konflik Israel dan Hamas Yang Melelahkan*.

³ *Ibid.*

Netanyahu pada saat pemilihan, tak mau terlihat sebagai pejabat yang pasif dan tak sanggup berbuat apa-apa terhadap serangan roket dari Gaza. Jika ini terjadi Netanyahu dipastikan akan memenangi pemilihan. Dengan serangan Israel ke Gaza selama tujuh hari terakhir, popularitas Barak dan Livni terbukti melejit. Apalagi sebelumnya Livni dianggap tak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang Perdana Menteri.

E. Kejahatan Perang Israel

Serangan militer Israel ke Gaza yang dimulai pada tanggal 27 Desember 2008 diawali dengan serangan udara. Serangan yang dilancarkan dari udara ini diberi nama "Operation Cast Lead".⁴ Serangan udara ini dilakukan oleh pesawat tempur F-16 serta helikopter Apache milik Israel. Selain melancarkan serangan udara, dalam agresinya kali ini Israel juga melancarkan serangan darat.

Serangan militer yang awalnya ditujukan untuk menumpas gerakan ataupun pengikut Hamas ini ternyata mengakibatkan jatuhnya korban rakyat sipil dan banyak diantaranya adalah anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Sebuah sumber medis Palestina mengatakan serangan militer Israel di Gaza menewaskan 1.330 orang, setidaknya separuh dari jumlah itu adalah warga sipil. Korban luka-luka tercatat 5.450 orang. Diantara korban tewas terdapat lebih dari 400 anak dibawah usia 16 tahun, dan lebih dari 100 perempuan. Timbulnya korban sipil ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional dan konvensi ke-4 Jenewa mengenai perlindungan untuk warga sipil saat perang. Tidak hanya itu

⁴ Konflik Israel-Gaza 2008-2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel-Gaza_2008-2009 diakses pada tanggal 10 April 2009

saja, serangan militer Israel juga menghancurkan sekitar 4000 rumah. Daftar panjang kerusakan yang dicatat otoritas Palestina juga mencakup kerusakan jalan, sekolah, jaringan listrik dan instalasi air. Secara total, 14% dari seluruh bangunan di Jalur Gaza berada dalam kondisi rusak atau hancur. Sekitar 53 instalasi yang digunakan oleh agen DK PBB telah hancur atau rusak, termasuk juga 37 sekolah hancur selama agresi tersebut. Enam buah gedung yang digunakan sebagai perlindungan darurat, enam buah pusat kesehatan dan dua gudang juga telah dihancurkan. Selain itu salah satu alasan yang bisa membawa Israel terseret sebagai penjahat perang adalah serangan mereka ke sekolah PBB di Kamp Pengungsian Jabaliya. Israel sendiri menyebut pejuang Hamas bersembunyi di sekolah itu. Faktanya, sekolah itu hanya diisi warga sipil. Akibatnya, 40 warga Palestina yang tewas, kesemuanya sipil, termasuk anak-anak.

Dalam kaitan ini, sebuah lembaga Internasional Pemantau Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch (HRW) mendesak Dewan Keamanan PBB membentuk komisi investigasi terhadap dugaan kejahatan perang itu. HRW sendiri tak bisa melakukan riset independen yang penuh. Hal ini disebabkan Israel selalu menutup akses masuk ke Gaza bagi media internasional dan pemantau hak asasi manusia sejak awal November. Akan tetapi, menurut saksi mata dan Lembaga PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), pada 6 Januari 2009, sedikitnya tiga tank Israel melepaskan granat ke sekolah Al-Fakhora. Israel berdalih telah ada tembakan mortir dari sekolah tersebut dan Hamas menggunakan sekolah tersebut menjadi tameng. Tentang pernyataan Israel bahwa ada mortir yang meluncur dari sekolah tersebut, dibantah keras saksi mata.

Direktur Representatif UNRWA, Andrew Whitley, menyebutkan tak ada milisi Hamas yang menggunakan sekolah itu sebagai tamengnya.

Banyaknya korban sipil yang jatuh serta rusaknya berbagai fasilitas sipil ini merupakan akibat penggunaan bom fosfor putih oleh militer Israel dalam serangannya. Sesuai Konvensi Genewa dan Konvensi Senjata Kimia Dunia (Chemical Weapons Convention) termasuk Palang Merah Internasional, mendorong pelarangan penggunaan fosfor putih. Dari perjanjian tersebut larangan penggunaan fosfor putih sebagai senjata pembakar. Fred Abrahams, peneliti HRW, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan sejumlah kasus penggunaan fosfor putih yang dilakukan pasukan Israel, di antaranya dalam serangan pengeboman ke sebuah rumah sakit di Gaza City. Israel juga menggunakan fosfor putih ketika mengebom kantor-kantor PBB di Gaza, sebuah sekolah dan pasar. Fred Abrahams juga mengatakan bahwa setiap selongsong fosfor putih meledak menjadi 116 serpihan dengan radius hingga 125 meter. kemudian serpihan-serpihan tersebut, terbakar ketika terpapar oksigen kemudian menciptakan hawa panas menyengat dan bisa menimbulkan luka bakar yang menyakitkan. Abrahams juga menyatakan bahwa dalam laporannya, HRW melampirkan dokumen internal militer Israel. Dokumen itu menyatakan bahwa militer Israel sendiri sebenarnya menyadari akan kerusakan yang bisa ditimbulkan bom fosfor putih itu. Anggota medis militer Israel juga diingatkan bahwa senjata itu memiliki potensi sangat besar merusak jaringan kulit.

Pada awalnya Israel menolak jika dituduh menggunakan fosfor putih dalam serangan militernya kali ini. Mereka menyatakan bahwa pihaknya hanya

menggunakan senjata yang diizinkan sesuai dengan peraturan hukum Internasional. Akan tetapi tekanan-tekanan yang datang dari berbagai pihak akhirnya memaksa zionis Israel untuk mengakui bahwa pihaknya memang telah menggunakan fosfor putih dalam agresi militernya di Gaza selama yang berlangsung lebih dari tiga pekan tersebut. Komplek PBB di kota Gaza merupakan salah satu wilayah yang mengalami serangan fosfor putih Israel terparah. Kawasan tersebut telah dihantam tiga buah roket Israel bermuatan fosfor putih pada tanggal 15 Januari 2009. Selain itu, Israel juga telah menyerang rumah sakit Al-Quds yang terletak di kota Gaza pada hari yang sama dan masih menggunakan mesiu yang sama pula. Sekitar 20 selongsong fosfor telah mereka luncurkan di atas daerah sekitar kota Gaza selama agresi militer mereka berlangsung. Beit Lahiya merupakan salah satu wilayah yang telah dimuntahkan serangan fosfor oleh pasukan zionis Israel. Beit Lahiya ini merupakan salah satu wilayah korban serangan fosfor terburuk.

Seorang pejabat senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Col Alkalai, menyatakan Militer Israel telah menggunakan dua jenis mesiu fosfor. Jenis yang pertama adalah dalam 155 mm artileri kerang, dan jenis yang kedua adalah munitions yang berdasarkan pusat dari penyelidikan oleh Col Alkalai, adalah standar fosfor kerang baik 88mm dan 120mm. Dengan pengakuan tersebut, maka jelas sudah satu pelanggaran hukum internasional yang telah dilakukan oleh Israel.

Kejahatan kemanusiaan lain yang dilakukan Israel juga disodorkan Palang Merah Internasional (ICRC). Mereka menuduh Israel menunda-nunda akses

ambulan ke daerah pertempuran untuk melakukan evakuasi. Ketua ICRC untuk Israel dan teritorial Palestina, Pierre Wettach, ICRC mengisahkan pengalaman memilikinya mereka setelah dapat akses masuk ke sejumlah rumah di kawasan Zeitoun, Gaza, Rabu tanggal 7 Januari 2009. Mereka menemukan empat anak kecil yang hanya bisa mendampingi ibu mereka yang sudah tewas di sebuah rumah. Di rumah lainnya, ICRC menemukan 15 warga yang selamat dari serangan Israel, termasuk beberapa yang terluka. Tiga mayat lagi ditemukan di rumah lain. ICRC juga mendapat kabar masih banyak korban luka yang tak bisa dapat bantuan di rumahrumah lain yang hancur di wilayah itu. ICRC yakin militer Israel tak memenuhi kewajiban sesuai hukum kemanusiaan internasional untuk merawat dan mengevakuasi korban luka. Tindakan mereka menunda-nunda memberikan akses penyelamatan tidak bisa diterima sama sekali.

F. Reaksi PBB Atas Agresi Militer Israel ke Gaza

Bagi PBB, tindakan agresor Israel di Jalur Gaza merupakan ujian berat. Kredibilitas dan kewibawaan PBB sangat terguncang karena organ PBB dinilai lamban dan terkesan dihegemoni oleh kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Setelah adanya desakan berbagai negara dan organisasi Internasional, maka Dewan Keamanan serta Dewan HAM PBB melakukan sidang dan mengeluarkan resolusi.

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB

Setelah melalui perdebatan dan sidang yang panjang, akhirnya Dewan Keamanan (DK) PBB berhasil mengeluarkan Resolusi 1860 tanggal 8 Januari

2009. Resolusi itu disepakati empat belas negara minus satu. Amerika Serikat memilih abstain. Sikap ini sudah diperhitungkan sejak awal. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat memilih abstain setelah sebelumnya berupaya memveto rencana resolusi.

Dalam catatan DK PBB, Resolusi 1860 dihasilkan melalui Sidang ke 6063 pada 8 Januari 2009. Amerika Serikat, satu-satunya negara yang memilih abstain terhadap resolusi tersebut. Ada lima belas anggota DK PBB periode 2009, yakni Austria, Burkina Faso, Costarica, Kroasia, Jepang, Libya, Meksiko, Turki, Uganda, Vietnam ditambah lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina.

Resolusi 1860 memuat desakan dan seruan untuk gencatan senjata yang segera, langgeng dan sepenuhnya dipatuhi menuju penarikan pasukan Israel dari Gaza (an immediate, durable and fully respected ceasefire, leading to the full withdrawal of Israeli forces from Gaza). Selain itu, wilayah Gaza harus dibuka untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Atas kebiadaban Israel, Resolusi 1860 juga menegaskan, *Condemns all violence and hostilities directed against civilians and all acts of terrorism*. Resolusi 1860 mendapatkan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Selain tidak rincinya upaya menengahi atau menegaskan posisi Israel sebagai agresor, sanksi dan dukungan atas hadirnya pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza juga tidak ditemukan. Berbeda dengan Resolusi DK PBB 1696, 1737, 1747 dan 1803 terhadap Iran yang secara tegas memberikan sanksi dan ancaman sanksi lain jika Iran tidak menghentikan proliferasi nuklirnya, Resolusi 1860 terkesan ambigu dan sulit diimplementasikan.

Sekalipun Resolusi 1860 dikeluarkan, Israel masih terus melancarkan serangan. Tudingan dan kecaman masyarakat internasional serta Resolusi DK PBB 1860 ternyata tidak efektif menyudahi arogansi Israel di Jalur Gaza.

2. Resolusi Dewan HAM PBB

Pada 12 Januari lalu, Dewan HAM (DH) PBB menyepakati untuk menerima resolusi tentang Pelanggaran Berat HAM di Wilayah Pendudukan Palestina yang terkait dengan Serangan Militer Israel di Pendudukan Jalur Gaza (The Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory Particularly Due to the Recent Israeli Military Attacks against the Occupied Gaza Strip). Dari 47 negara anggota DH, 33 negara setuju (termasuk Indonesia), 1 negara menolak (Kanada) dan 13 negara abstain (Kamerun, Jepang, Republik Korea dan selebihnya negara-negara Uni Eropa).

Resolusi DH PBB ini diawali desakan yang cukup kuat disampaikan atas nama kelompok negara-negara Arab, Afrika, OKI dan Gerakan Non-Blok. Koalisi yang juga diusung sebagian besar anggota DH PBB meminta agar Presiden DH PBB, Martin I. Uhomoibhi, menggelar Sidang Khusus (Special Session) tanggal 9 Januari 2009. Koalisi ini cukup efektif sehingga resolusi akhirnya bias diadopsi sekalipun banyak negara yang abstain.

Resolusi yang terdiri atas 17 poin ini secara tegas menyebutkan bahwa operasi militer Israel yang dilakukan secara masif dan sistematis telah sempurna mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat HAM di Jalur Gaza (grave violations of human rights in the occupied Gaza Strip). Oleh karena itu, amanat resolusi menegaskan atas segala tindakan penyerangan Israel patut diberlakukan hukum

HAM internasional (international human rights law) dan hukum humaniter internasional (international humanitarian law). Tidak terkecuali, resolusi menegaskan kewajiban negara dalam keikutsertaannya sebagai negara peserta pada Empat Konvensi Geneva Tahun 1949 (obligations of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva conventions). 194 negara telah mengadopsi Konvensi Geneva itu, tidak terkecuali Israel yang telah mengadopsinya pada 6 Juli 1951. Untuk memperoleh data dan penyelidikan lebih lanjut, DH PBB meminta organ utama PBB, seperti Sekretaris Jenderal PBB, Komisi Tinggi HAM PBB dan kepada Pelapor-pelapor Khusus (Special Rapporteurs) PBB untuk segera memantau perkembangan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Israel dan melaporkannya pada Sidang Dewan HAM mendatang.

Tekanan dan dukungan senada juga ditegaskan oleh Richard Falk, Pelapor Khusus PBB tentang HAM di Wilayah-wilayah Pendudukan (Special Rapporteur for Human Rights in the Occupied Territories). Menurutnya, Israel telah secara sistematis melakukan pelanggaran berat HAM. Hal itu bisa diamati dari tiga hal mendasar, yakni (1) Collective punishment, yakni 1,5 juta penduduk Palestina harus mendapatkan hukuman padahal serangan Israel dialamatkan untuk beberapa militan; (2) Targeting civilians, korban serangan udara Israel dialamatkan pada perkampungan sipil; dan (3) Disproportionate military response, yakni serangan Israel tidak saja menghantam kantor-kantor pemerintahan dan keamanan Palestina, tetapi juga menghantam warga sipil, bahkan sekolah dan sarana transportasi masyarakat.

Dikeluarkannya resolusi Dewan HAM PBB ini diharapkan dapat segera menyeret Israel ke Mahkamah Internasional guna mempertanggungjawabkan tindakannya yang melakukan kejahatan perang selama serangan militernya ke Gaza berlangsung. Adanya resolusi ini juga diharapkan mampu meredam konflik Israel-Palestina yang telah lama berlangsung.

G. Gencatan Senjata Sepihak Israel

Setelah 22 hari menggempur Jalur Gaza, Israel secara sepihak akhirnya menyatakan gencatan senjata. Meski demikian, pasukan Israel masih melakukan serangan di berbagai titik di Gaza dan tentara-tentara Israel itu masih belum mampu menguasai kota. Gencatan senjata dari pihak Israel, diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dalam keterangan persnya di Tel Aviv. Ia mengklaim bahwa Israel telah mencapai target agresinya ke Jalur Gaza yang telah ditetapkan oleh kabinetnya. Olmert mengatakan pihaknya mengambil keputusan gencatan senjata setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Mesir Husni Mubarak dan setelah Tel Aviv menandatangani kesepakatan kerjasama dengan AS hari Jumat kemarin untuk menangani masalah yang diklaim Israel sebagai penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza.

Israel mulai memberlakukan gencatan senjata pada Minggu, 18 Januari 2009 pukul 02.00 dinihari waktu setempat. Namun dalam gencatan senjata itu, Israel tidak menyinggung masalah penarikan pasukannya dari Jalur Gaza dan pencabutan blokade di Gaza seperti tuntutan Hamas. Israel juga mengancam akan kembali menyerang Gaza jika pejuang Palestina menembakkan roketnya.

Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, sebuah helikopter Israel masih melakukan serangan ke beberapa titik di Gaza City dan menjatuhkan bom-bom yang mengandung senjata kimia berbahaya fosfor putih. Press TV-stasiun televisi berbahasa Inggris yang berbasis di Iran-menayangkan pemandangan Gaza City yang masih diliputi asap putih akibat ledakan bom-bom fosfor tersebut. Selama 23 hari agresi brutal pasukan Zionis ke Jalur Gaza, sekitar 1.215 warga Gaza gugur syahid dan 6.000 orang lainnya luka-luka. Sementara di pihak Israel, Tel Aviv mengklaim kehilangan 12 tentaranya dan 85 orang lainnya luka-luka. Sedangkan Hamas menyatakan berhasil menewaskan 34 tentara Israel dan mencenderai 96 orang lainnya.

Hamas menyikapi dingin pernyataan gencatan senjata yang diumumkan secara sepihak oleh Israel tanpa melibatkan pihak Palestina. Juru Bicara Hamas Fawzi Barhum mengatakan, gencatan senjata harus disertai penghentian agresi secara total, penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, pencabutan blokade dan pembukaan perbatasan. Barhum menyatakan, Hamas akan terus melakukan perlawanan terhadap Israel sampai semua tuntutan Hamas dipenuhi.

Sehari setelah Israel menyatakan gencatan senjata secara sepihak, Hamas dan sekutunya, sejumlah faksi Palestina mendeklarasikan gencatan senjata satu minggu di Jalur Gaza. Gencatan senjata itu untuk memberikan kesempatan kepada Israel keluar dari wilayah mereka. Keputusan itu merupakan hasil pertemuan sejumlah faksi Palestina di Damaskus Suriah, Minggu 18 Januari 2009. Hamas juga meminta Israel membuka seluruh perbatasan Jalur Gaza agar makanan dan kebutuhan pokok lainnya bisa diterima warga. Menanggapi pengumuman Hamas

itu, Israel menyatakan tidak akan mempertimbangkan batas waktu penarikan pasukan yang dikemukakan Hamas sampai Hamas dan kelompok lainnya menghentikan tembakan ke Israel.

Pernyataan gencatan senjata secara sepihak oleh Israel dan penegasan Hamas itu, membuktikan bahwa Israel tidak mampu menumbangkan Hamas, apalagi sampai hari ke-23 pasukan Zionis juga masih belum bisa menguasai Gaza sepenuhnya. Dari sisi moral, Hamas telah memenangkan perang yang dikobarkan Israel. Sedangkan Israel, cuma menuai kecaman dari masyarakat dunia karena pasukan militernya telah membunuh warga sipil Palestina tak berdosa, sekaligus menunjukkan karakter Israel sebagai negara penjajah yang membahayakan kawasan Timur Tengah.

H. Solidaritas Dunia Arab Dalam Agresi Militer Israel ke Gaza

Serangan militer Israel ke Gaza yang berlangsung selama 22 hari sejak tanggal 27 Desember 2008, telah membawa korban jiwa yang cukup besar. Lebih dari 100 nyawa menjadi korban. Bahkan diantaranya adalah rakyat sipil, wanita, serta anak-anak yang tidak berdosa. Selain itu berbagai infrastruktur serta fasilitas publik juga ikut hancur akibat serangan ini. Respon atas kebiadaban Israel ini bermunculan dari berbagai negara, serta organisasi Internasional.

Sejak Israel menyerang Gaza, protes anti-Israel terjadi di segala penjuru dunia, terutama di negara-negara Muslim dan dunia Arab. Bahkan, beberapa negara telah menggalang bantuan dana dan tenaga sukarela untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi Israel. Pemimpin Libya Muammar

Gaddafi yang pertama kali melontarkan kecaman atas serangan brutal Zionis Israel ke Jalur Gaza. Ia menyerukan dunia Arab mengambil sikap tegas terhadap Israel dan mendesak agar perbatasan-perbatasan di Gaza dibuka.

Sementara itu Mesir mengutuk keras serangan udara Israel dan mengatakan pihaknya akan tetap berusaha agar diberlakukan kembali gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Kantor Kepresiden Mesir dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita Mena mengatakan Israel harus bertanggung jawab atas korban tewas dan cedera akibat serangan itu. Mesir telah berusaha memperingatkan Israel atas konsekuensi serangan ke Gaza, dan telah mendesak kelompok-kelompok Palestina untuk memperbarui lagi gencatan senjata yang masa berlakunya telah berakhir pekan lalu setelah enam bulan diberlakukan. Pernyataan kantor presiden Mesir itu mengatakan Mubarak telah memerintahkan agar pintu penyebarangan Rafah di perbatasan antara Mesir dan Gaza dibuka untuk para korban Palestina, dan fasilitas-fasilitas medis Mesir disediakan bagi melayani semua korban serangan udara Israel.

Ribuan warga Iran didampingi para pejabat pemerintah dan militer bersama-sama turun ke jalanan dan memprotes serangan Israel, pada hari Senin 29 Desember 2009. Banyak yang membawa spanduk bertuliskan "Israel harus dihapuskan dari muka bumi" dan "Kita harus bangkit, bersatu bersama-sama menghancurkan Israel". Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pun mengajak kaum Muslim di dunia untuk menghukum bangsa Israel. Selain memberikan dukungan, Iran juga mengirimkan tenaga sukarela untuk melawan

Israel. Perekrutan tenaga sukarela dari Iran mulai dilakukan kelompok pelajar garis keras.

Ratusan warga Irak pun melakukan protes anti-Israel di Baghdad dan salah satu kota Syiah, yakni Kufa. Para pengikut tokoh radikal yang anti-IS, Moqtada al-Sadr, turun ke jalanan kota Sadr City dan membakar bendera Israel. Pemerintah Irak juga secara resmi mengecam serangan Israel yang dianggap keterlaluhan dan tak berperikemanusiaan itu. Situasi yang sama juga terlihat di Beirut, Lebanon. Puluhan ribu pendukung Hezbollah protes segera setelah pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, mengajak warga Muslim di seluruh dunia untuk bangkit dan menunjukkan solidaritas kepada rakyat Gaza. Kecaman keras juga datang dari Perdana Menteri Lebanon Fuad Saniora yang menyebut serangan Israel itu sebagai operasi kriminal.

Di Afganistan, kelompok Taliban juga mengajak seluruh umat Muslim di dunia bersatu dan bersama-sama menyerang Israel sebagai tindakan balasan atas operasi militer Israel ke Gaza yang menewaskan lebih dari 300 warga Palestina. Taliban mengecam AS dan Eropa karena tak segera membantu menghentikan serangan Israel.

Suriah dan Turki, memperingatkan mengenai reaksi berbahaya atas agresi Israel yang berlanjut ke Jalur Gaza terhadap keamanan dan kestabilan di wilayah itu, demikian laporan kantor berita resmi Suriah, SANA. Presiden Suriah Bashar Al-Assad dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan tersebut selama satu pertemuan di ibukota Suriah, Damaskus. Dalam pertemuan itu, mereka membahas pembantaian yang dilakukan oleh Israel

terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan cara untuk menghentikan pertumpahan darah di kalangan rakyat Palestina, mencabut sanksi dan membuka tempat penyeberangan. Mereka mendesak negara Arab untuk memikul tanggung-jawab mereka dengan cara menjamin pengiriman semua keperluan hidup dan medis buat rakyat di Jalur Gaza, terutama korban kejahatan Israel.

Selain berbagai kecaman yang dikeluarkan, beberapa pemimpin negara Arab juga sepakat untuk melakukan konferensi tingkat tinggi khusus untuk membahas krisis di Gaza. Emir Qatar Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani menyerukan diadakannya KTT darurat untuk membahas masalah Gaza. KTT yang diusulkan Qatar ini gagal meraih dukungan dari 15 negara anggota Liga Arab, padahal kuorum diperlukan untuk pengambilan keputusan resmi. Akan tetapi beberapa negara tetap menghadiri KTT yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2009 yang bertempat di Doha, Qatar ini. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan pemimpin politik Hamas Khaled Mashaal secara tak diduga hadir dalam konferensi darurat para pemimpin Arab di ibu kota Qatar, Doha. Pertemuan ini ditujukan untuk menampung pertimbangan para pemimpin Arab mengenai upaya diplomatik yang perlu diambil untuk menyelesaikan krisis di Gaza. Sementara itu, Sekutu AS, Mesir dan Arab Saudi memboikot KTT Doha. Aksi pemboikotan dilakukan Mesir dan Arab Saudi karena khawatir akan kemungkinan Hamas dan sekutunya, Suriah dan Iran, menggunakan KTT tersebut untuk menyampaikan posisi garis keras serta menghalangi upaya Mesir menjadi mediator gencatan senjata Hamas-Israel. Arab Saudi dan Mesir lebih memilih untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi yang akan diadakan di Kuwait.

Konferensi tingkat tinggi (KTT) ekonomi pertama Arab diselenggarakan di ibu kota Kuwait, Senin 19 Januari 2009, dengan pusat perhatian pada situasi di Jalur Gaza dan seruan bagi persatuan di dunia Arab guna menyelesaikan krisis di Jalur Gaza. KTT ekonomi tingkat tinggi itu dihadiri oleh 17 kepala negara di kalangan 22 anggota Liga Arab, serta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dengan slogan "Dalam Solidaritas bagi Rakyat Palestina di Gaza".

Dalam pidato pembukaan KTT yang disiarkan langsung, tuan rumah Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber as-Sabah mengutuk serbuan 22 hari Israel ke Jalur Gaza sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ia memuji perlawanan rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatan manusia dan hak alamiah mereka untuk mendirikan negara merdeka. Dunia Arab mendukung saudara Palestina mereka dalam perlawanan mereka terhadap agresi Israel, demikian janji Sheikh as-Sabah. Ia menyerukan penerapan segera dan tanpa syarat Resolusi 1860 PBB guna melicinkan jalan bagi penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari semua wilayah pendudukan dan pencabutan blokade atas Jalur Gaza. Emir Kuwait tersebut mengumumkan bahwa Kuwait akan menyumbang 34 juta dollar AS untuk memungkinkan Badan Pekerjaan dan Pertolongan PBB (UNRWA) memasok keperluan mendesak rakyat Palestina.

Presiden Suriah Bashar al-Assad juga berbicara pada pertemuan tersebut, dan menyatakan gencatan senjata sepihak yang diumumkan Israel tak berarti berakhirnya kerusuhan serta menambahkan selama tentara Israel tetap berada di Jalur Gaza, takkan ada akhir kerusuhan. Ia menyerukan negara Arab agar mendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza dalam perjuangan mereka untuk meraih

hak politik dan militer terhormat mereka, dengan bantuan bagi pembangunan kembali daerah kantong miskin itu.

Presiden Mesir Hosni Mubarak berjanji akan melanjutkan upaya guna memperpanjang gencatan senjata antara rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Israel serta membantu tercapainya perujukan di kalangan rakyat Palestina. Ia menyatakan, Mesir telah melakukan upaya besar guna mendukung rakyat Palestina sejak dilancarkannya serangan Israel ke Jalur Gaza, termasuk gagasan gencatan senjata, menyerahkan bantuan ke dalam wilayah Jalur Gaza, mengizinkan orang Palestina yang cedera dirawat di rumah sakit Mesir, dan memfasilitasi perujukan Palestina. Mesir menghormati perlawanan rakyat Palestina terhadap serbuan dan hak mereka guna memerangi pendudukan. Mubarak juga menyatakan, perlu penyelesaian praktis guna mengakhiri pembunuhan rakyat Jalur Gaza, bukan hanya pernyataan pengutukan terhadap serangan Israel. Presiden Mesir tersebut juga menyeru Israel untuk secara sungguh-sungguh mempertimbangkan gagasan perdamaian Arab karena mewujudkan perdamaian di Timur Tengah adalah keperluan mendesak.